

ANALISIS PEMAHAMAN DAN AKUNTABILITAS MANAJER PUBLIK TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Rulyanti Susi Wardhani

Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

e mail: rulyanti_sw@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan akuntabilitas dari manajer umum termasuk pemahaman akuntabilitas manajer publik dan kemampuan menerapkan hasil untuk mengukur pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintah di Pangkalpinang. Ada 55 lembaga dari 64 lembaga sebagai sampel penelitian. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala Unit Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di masing-masing instansi. Analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan akuntabilitas manajer publik sangat baik dengan tingkat persentase 84,43% dan 83,05%. Sedangkan hasil uji statistik menunjukkan pemahaman manajer publik tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Pangkalpinang. Sedangkan akuntabilitas manajer publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kemudian secara bersama-sama pemahaman dan akuntabilitas manajer publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Kata Kunci: Pemahaman, akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Krisis ekonomi yang pernah melanda bangsa Indonesia mengakibatkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik dan bersih. Tuntutan tersebut tentu mendorong pengembangan dan penerapan pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan efektif agar penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Roda kepemerintahan dijalankan dengan dibantu oleh instansi atau lembaga yang mana dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasannya memerlukan koordinasi yang lebih baik.

Salah satu persoalan yang mengganggu hubungan kerja dalam suatu institusi atau lembaga tersebut adalah perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman antar individu atau kelompok akan menunjukkan perbedaan pemahaman suatu instansi dalam mencapai kesuksesan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan. Manajer publik membutuhkan pemahaman karena pemahaman yang dikembangkan seseorang dari gagasan dan sikapnya akan mempengaruhi perilaku seseorang, jika pegawai berpotensi untuk memahami tentang kedudukan atau penempatan yang sesuai dengan keahliannya, pegawai akan termotivasi dan merasa puas. Pemahaman seseorang terhadap orang lain, situasi atau objek adalah hasil dari proses pembelajaran. Hasil dari proses pembelajaran tidak hanya berupa pemahaman saja tetapi juga berupa aplikasi dari hasil pemahaman tersebut.

Selain menanggapi tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah juga mencanangkan otonomi daerah yang berlaku mulai Januari 2001 dan daerah diberi kewenangan yang luas serta bertanggungjawab atas daerahnya secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tetapi dengan adanya otonomi daerah tersebut malah mengakibatkan rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun DPRD (Kuncoro, 2002).

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat maka perlu adanya akuntabilitas. Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan mewajibkan instansi pemerintah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan media utama untuk menuangkan kinerjanya. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Tujuan disusunnya LAKIP adalah mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan lembaga atau instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Oleh karena itu, LAKIP merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap manajer atau pejabat publik. Saat ini manajemen pengolahan pemerintahan telah mengalami perubahan dan karakteristik pengolahan publik yang berbasis kekuasaan tanpa adanya pertanggungjawaban kinerja yang jelas kearah pengolahan publik yang berlandaskan pada akuntabilitas dan pemenuhan kepuasan pengguna jasa.

Kota Pangkalpinang adalah salah satu Daerah Pemerintahan Kota di Indonesia yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus merupakan ibukota Provinsi. Dalam menjalankan roda pemerintahan kota Pangkalpinang tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang tersebar di berbagai unit instansi pemerintahan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2009 ada beberapa kelemahan yang didapat dari analisis lingkungan yang dilakukan yaitu: mutu pelayanan kepada masyarakat yang lemah, sistem administrasi pemerintah yang belum berjalan semestinya, keterbatasan dana, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan di kota Pangkalpinang.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang disusun dengan berpedoman pada rencana strategis (Renstra) 2003-2008 dan dijabarkan sesuai rencana kinerja tahun 2009 yang dilaksanakan di Dinas Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari 23 tujuan, 59 sasaran dan 23 program kerja. Secara umum seluruh program dan kegiatan pada tahun 2009 telah dilaksanakan dengan baik dengan pencapaian realisasi fisik kegiatan sebesar 95,31% dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya mencapai 90,17%. Tetapi daya serap keuangan sebesar 80,31% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008.

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman manajer publik pada instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang. 2) Bagaimana akuntabilitas manajer publik pada instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang dan 3) Bagaimana pengaruh pemahaman dan akuntabilitas manajer publik terhadap kinerja instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

KAJIAN PUSTAKA

Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mengartikan suatu hal, atau suatu proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan sebagaimana dijelaskan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005; 811). Pemahaman seseorang terhadap orang lain, situasi atau objek lain adalah hasil dari proses pembelajaran. Hasil dari proses pembelajaran tidak hanya berupa pemahaman saja tetapi juga berupa aplikasi dari hasil pemahaman tersebut pemahaman seorang manajer dapat berupa pemahaman mengenai peraturan

perundang-undangann dan pelayanan publik serta penyajian laporan akuntabilitas itu sendiri karena tugas seorang manajer yang paling penting dan utama adalah bagaimana menciptakan suatu sistem akuntabilitas yang diterima masyarakat sehingga evaluasi kinerja instansi jelas.

Akuntabilitas

Mardiasmo (2007) akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Ledvina V. Carino dalam Pusdiklatwas BPKP (2007) tentang akuntabilitas instansi pemerintah mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada di luar tanggung jawab dan kewenangannya. Selanjutnya J.B. Ghartey yang juga dikutip dari Pusdiklatwas BPKP (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.

Sedangkan menurut SK-LAN Nomor: 239/1X/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Prinsip Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara yang dikutip dari Modul Pusdiklat BPKP tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (2007) pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, 2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai perundang-undangan yang berlaku, 3) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, 5) Jujur, objektif dan inovatif terhadap perubahan instansi manajemen pemerintah dalam pemuktahiran metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas, dan 6) Menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Agar sistem akuntabilitas dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkannya hal-hal sebagai berikut: 1) Pernyataan yang jelas mengenai tujuan, Untuk itu, dibutuhkan suatu pernyataan tujuan yang realities dan dapat diukur, 2) Pola pengukuran tujuan. Setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang menagrah pada pencapaian tujuan dan hasil. Memilih indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program membutuhkan cara-cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dapat mencapai hal yang diinginkan, 3) Pengakomodasian sistem insentif. Suatu sistem insentif perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem insentif harus dilakukan dengan hati-hati, 4) Pelaporan dan penggunaan data. Suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi para pemimpin, pembuat keputusan, manajer program dan masyarakat, dan 5)

Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasi untuk mendorong akuntabilitas.

Dimensi Akuntabilitas

Menurut Ellwod dalam Mahmudi (2005) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, 2) Akuntabilitas Manajerial., 3) Akuntabilitas Program, 4) Akuntabilitas Kebijakan, 5) Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pengelolaan (BPKP) yang dikutip oleh Nita Garnita (2008) membedakan jenis akuntabilitas menjadi tiga macam, yaitu: 1) Akuntabilitas Keuangan. Komponen akuntabilitas keuangan meliputi: a) Integritas keuangan, b) Pengungkapan, dan c) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2) Akuntabilitas Manfaat. Akuntabilitas manfaat pada dasarnya berfokus pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintah, 3) Akuntabilitas Prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan kepada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Manajer Publik

Manajer publik menurut Azhar seperti yang dikutip Dini Arwati (2003; 21) adalah orang yang bertanggungjawab atas segala kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam organisasi sektor publik yang bertujuan memuaskan para pihak yang berkepentingan melalui layanan publik dan pelestarian kepercayaan publik.

Manajer publik bertanggung jawab juga berkewajiban untuk memberikan umpan balik dan pengarahan kepada anak buahnya. Dalam hal ini, pembuatan keputusan dan pengarahan merupakan tugas terpenting manajer dalam organisasi. Pemberian umpan balik atas kinerja bawahan bermanfaat dalam memberikan informasi kepada bawahan atas kemajuan yang ia lakukan dalam mencapai tujuan organisasi berdasarkan standar kinerja. Dengan memberikan umpan balik, diharapkan bawahan bisa membuat perbaikan.

Kinerja

Menurut SK-LAN Nomor: 239/1X/6/8/2003 menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sedangkan "kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja

Menurut SK-LAN (2003) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok; a) masukan (*inputs*), b) keluaran (*outputs*), c) hasil (*outcomes*) Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk dan jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, d) manfaat (*benefits*), dan e) dampak.

Pengukuran Kinerja

Menurut SK-LAN tentang Pedoman Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2003) dijelaskan bahwa Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan .pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, .misi dan strategi instansi pemerintah. Menurut Wittaker dalam Mohamad Mahsun (2006) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”.

Penilaian kinerja memberikan umpan balik kepada manajer puncak mengenai pelaksanaan wewenang dan penggunaan sumber daya dalam melaksanakan wewenang oleh manajer yang lebih rendah. Penilaian kinerja juga bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Penilaian kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja yang dicapai dalam organisasi. Kinerja tersebut diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting baik pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi pihak internal, manajer membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja.

Instansi Pemerintah

Menurut SK-LAN Nomor: 239/1X/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut),Kepolisian Republik Indonesia. Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah instansi pemerintahan di Kota Pangkalpinang sebanyak 64 instansi tahun 2009, Sedangkan sampel adalah tingkat dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, dan satuan organisasi yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan untuk melayani masyarakat yang berjumlah 55 dengan menggunakan *Stratified Random Sampling*.

Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian agar dapat diukur dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan judul variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah: Variabel bebas yang terdiri dari 1) Pemahaman manajer publik (X_1) , 2) Akuntabilitas manajer publik (X_2), dan , kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen (Y).

Metode Analisis Data

Uji validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan Teknik korelasi *Rank Spearman* (r_s). Biasanya syarat minimal yang dianggap memenuhi syarat adalah jika r kritis adalah 0,3. Jadi apabila korelasi antara skor pernyataan dengan skor total

kurang 0.3 maka pernyataan dalam kuesioner tidak valid. Jika pernyataan dalam kuesioner telah dinyatakan valid, maka selanjutnya adalah menguji reliabilitas seluruh pernyataan tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, dengan menggunakan skala likert dengan 5 jawaban dari nilai paling rendah =1 sampai yang paling tinggi = 5. Suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh > 0,60 (Imam Ghozali, 2005: 42). Setelah instrumen valid dan reliabilitas maka melakukan uji asumsi yang terdiri dari : uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji Heteroskedastisitas.

Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan regresinya dengan rumus : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas terhadap 10 item pernyataan untuk variabel pemahaman manajer publik, 18 item pernyataan untuk variabel akuntabilitas manajer publik, 20 item pertanyaan untuk variabel kinerja instansi termasuk kategori valid karena *r* hitung lebih besar dari *r* kritis (0,3). Untuk uji reliabilitas baik variabel bebas dan terikat ternyata semuanya reliabilitas karena dengan menguji dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α). Suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi karena semuanya di atas > 0,60.

Pengujian Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Normalitas data digunakan uji Kolmogorof Smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, kemudian uji multikolinieritas variabel penelitian tidak terjadi multikolinieritas, dan dari uji heteroskedastisitas, didapat model regresi juga tidak mengandung heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pemahaman manajer publik (X_1) dan akuntabilitas manajer publik (X_2) sebagai variabel terikat dan kinerja instansi pemerintah (Y) sebagai variabel bebas. Hasil analisis regresi penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi (Coefficients^a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	45.908	12.824		3.580	.001
Pemahaman Manajer Publik	-.065	.375	-.028	-.172	.864
Akuntabilitas Manajer Publik	.479	.178	.431	2.687	.010

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 1 diperoleh konstanta sebesar 45,908 dan koefisien variabel pemahaman manajer publik sebesar - 0,065 dan koefisien variabel akuntabilitas manajer publik sebesar 0,479. Koefisien regresi tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan uji t, untuk koefisien variabel pemahaman manajer publik diperoleh *t* hitung = -0,172 dengan *sign*(*p*) = 0,864. Karena *sign*(*p*) > 0,05 yang berarti bahwa koefisien regresi tersebut tidak signifikan, maka menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari pemahaman manajer publik terhadap kinerja instansi pemerintah. Untuk koefisien variabel akuntabilitas manajer publik diperoleh *t* hitung = 2,687 dengan *sign*(*p*) = 0,010. Karena *sign*(*p*) < 0,05 yang berarti bahwa koefisien

regresi tersebut signifikan, maka menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan dari akuntabilitas manajer publik terhadap kinerja instansi pemerintah.

Model regresi yang dapat digunakan menyatakan hubungan kedua variabel tersebut: $Y = 45,908 - 0,065X_1 + 0,479X_2$. dimana:

Y :adalah kinerja instansi pemerintah X_2 : adalah akuntabilitas manajer publik.

X_1 :adalah pemahaman manajer publik

Model regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas manajer publik 1% akan diikuti dengan meningkatnya kinerja instansi pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar 47,9%. Model regresi tersebut juga diuji kebermaknaannya menggunakan uji F seperti pada output berikut:

Tabel 2
Hasil Uji F (ANOVA^b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	436.090	2	218.045	5.382	.008 ^a
	Residual	2106.746	52	40.514		
	Total	2542.836	54			

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Manajer Publik, Pemahaman Manajer Publik

b. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 2 F hitung sebesar 5,382 dengan $\text{sign}(p) = 0,008$. Karena nilai $\text{sign}(p) < 0,05$ yang berarti bahwa model regresi tersebut signifikan. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan akuntabilitas manajer publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Besarnya kontribusi pemahaman dan akuntabilitas manajer publik terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari koefisien determinasi seperti pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Koefisien Determinasi (Model Summary^b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.414 ^a	.171	.140	6.365

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Manajer Publik, Pemahaman Manajer Publik

c. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam tabel 3, nilai R-square sebesar 0,171 yang berarti bahwa kontribusi pemahaman dan akuntabilitas manajer publik terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 17,1%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 82,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan.

Pembahasan

Berdasarkan pengolahan data dan penilaian terhadap jawaban manajer publik sebagai responden, skor yang diperoleh untuk mengukur subvariabel secara keseluruhan menggambarkan bahwa pemahaman dan akuntabilitas manajer publik pada instansi pemerintah Kota Pangkalpinang sudah cukup baik begitu juga dengan kinerja yang telah diberikan. Hal ini dapat diuraikan lebih jelasnya sebagai berikut:

Pemahaman Manajer Publik

Nilai Pemahaman manajer publik diperoleh nilai sebesar 2323 atau 84,43%. Persentase ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer publik atas akuntabilitas sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman atas peraturan

perundang-undangan diperoleh sebesar 81,16% dan tingkat pemahaman atas penyajian laporan pertanggungjawaban diperoleh sebesar 83,78%.

Kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja tentunya berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Selanjutnya diterbitkannya Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan bagaimana mencapai sasaran tersebut (dalam bentuk uraian kebijakan dan program). Sekurang-kurangnya LAKIP terdiri dari : (1) Ikhtisar Eksekutif, (2) Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Instansi, serta Analisis Perkembangan Strategik, (3) Rencana Strategik dan Rencana Kinerja, (4) Akuntabilitas Kinerja, meliputi Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, (5) Penutup, dan (6) Lampiran yang meliputi Formulir PKK dan Formulir PPS serta dokumen lain yang diperlukan. Seperti disebutkan di atas, dalam LAKIP bagian akuntabilitas kinerja terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan proses pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan rinci. Apabila memungkinkan, dapat dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Lebih lengkapnya, laporan akuntabilitas meliputi pengungkapan mengenai mandat apa yang diemban instansi, perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja instansi, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas Manajer Publik

Akuntabilitas manajer publik diperoleh nilai sebesar 4950 atau 83,05%.. Persentase ini menunjukkan bahwa akuntabilitas manajer publik sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari akuntabilitas keuangan diperoleh sebesar 84,18%,, akuntabilitas prosedural diperoleh skor sebesar 80,73% dan akuntabilitas prosedural diperoleh sebesar 83,15%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas keuangan menggambarkan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas prosedural menggambarkan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan kepada keputusan yang ada untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dengan adanya pernyataan yang tegas mengenai tujuan, sasaran dan program yang kan dilaksanakan oleh instansi pemerintah serta selalu melaksanakan kegiatan atau program kerja sesuai dengan tata kerja yang telah ditetapkan.

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang

Variabel kinerja instansi pemerintah diperoleh nilai sebesar 4398 atau 79,96%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah dari sisi keuangan maupun non keuangan baik dari efektifitas, efisien, sumber daya dan kepuasan pelanggan telah dilaksanakan dengan baik. Dimana indikator efektifitas sebesar 80,36%, indikator efisiensi sebesar 81,27%, indikator sumber daya manusia sebesar 78,91% dan indikator kepuasan pelanggan sebesar 80,16%. Hal ini dapat dilihat dari berikut: a) Tingkat pengguna layanan kepada masyarakat meningkat serta kemudahan dalam pengaksesan layanan jasa, b) Kegiatan atau program kerja yang dilakukan memberikan hasil yang optimal dengan memperhatikan biaya yang dikeluarkan dan selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan, c) Kompetensi para pegawai yang meningkat setiap tahunnya karena mereka selalu mendapat pelatihan ataupun seminar dan selalu melakukan evaluasi terhadap prestasi para pegawainya, dan d) Kepuasan pelanggan akan layanan yang diberikan terus meningkat yang didukung dengan fasilitas yang memadai, tarif yang dibebankan bersifat wajar serta kemampuan dan sikap yang ditunjukkan pegawai membuat para pelanggan merasa nyaman.

Selain itu, nilai kinerja instansi pemerintah terkait dengan pelayanan publik setiap instansi diperoleh sebesar 1322 atau 52,88%. Persentase ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan cukup baik dan hanya pada pelayanan listrik berada pada tingkat tidak baik. Untuk lebih jelasnya perolehan skor untuk setiap pelayanan publik yang diberikan akan dijelaskan sebagai berikut:

Pelayanan pendidikan persentase yang dihasilkan sebesar 74%, pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 46,4%, pelayanan transportasi sebesar 52%, pelayanan sarana dan prasarana jalan sebesar 64,2%, pelayanan penerangan jalan sebesar 49,6%, pelayanan pembuatan KTP dan lainnya sebesar 50,4%, pelayanan keamanan sebesar 50,4%, pelayanan persediaan air minum/air bersih sebesar 43,6%, pelayanan listrik 39,8% dan pelayanan kebersihan sebesar 60,8%.

Pengaruh Pemahaman dan Akuntabilitas Manajer Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan konstanta sebesar 45,908 dan koefisien variabel pemahaman manajer publik sebesar - 0,065 dan koefisien variabel akuntabilitas manajer publik sebesar 0,479. Dari model regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan akuntabilitas manajer publik sebesar 1% akan diikuti dengan meningkatnya kinerja instansi pemerintah sebesar 47,9%.

Mengetahui pengaruh variabel pemahaman dan akuntabilitas manajer terhadap kinerja instansi pemerintah secara individual digunakan uji t. Variabel pemahaman manajer publik diperoleh $t_{hitung} = -0,172$ dengan $sign(p) = 0,864$. Karena $sign(p) > 0,05$ yang berarti bahwa variabel tersebut tidak signifikan, maka menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari pemahaman manajer publik terhadap kinerja instansi pemerintah. Variabel akuntabilitas manajer publik diperoleh $t_{hitung} = 2,687$ dengan $sign(p) = 0,010$. Karena $sign(p) < 0,05$ yang berarti bahwa variabel tersebut signifikan, maka menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan dari akuntabilitas manajer publik terhadap kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan akuntabilitas manajer publik secara bersama-sama diperoleh F hitung sebesar 5,382 dengan $sign(p) = 0,008$. Karena nilai $sign(p) < 0,05$ yang berarti bahwa model regresi tersebut signifikan. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan akuntabilitas manajer publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Besarnya kontribusi pemahaman dan akuntabilitas

manajer publik terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 17,1% dan sisanya yaitu sebesar 82,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman manajer publik atas akuntabilitas pada instansi pemerintah dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan penyajian laporan akuntabilitas manajer publik tiap instansi pemerintah manajer tiap instansi meliputi pengungkapan mengenai mandat apa yang diemban instansi, perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja instansi, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan.
2. Akuntabilitas manajer pada instansi pemerintah dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari akuntabilitas keuangan yang menggambarkan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabilitas manfaat Akuntabilitas prosedural yang menggambarkan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan dan akuntabilitas prosedural yang telah dijalankan dengan sangat baik.
3. Kinerja instansi pemerintah dari sisi keuangan maupun nonkeuangan maupun dari jawaban masyarakat telah dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa indikator yang belum dilaksanakan dengan baik. Pemahaman dan akuntabilitas manajer publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Ini artinya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah tidak hanya dengan adanya pemahaman yang baik mengenai akuntabilitas tapi juga disertai dengan kemampuan untuk menerapkan akuntabilitas tersebut dengan baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2009. *Pangkalpinang dalam Angka*. Pangkalpinang: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/1X/6/8/2003 tentang *Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Kuncoro, 2002, *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2009.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UP AMP YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, Mohamad dkk, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2006, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*”, *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1.
- Pusdiklatwas BPKP, 2007, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Edisi Kelima.